

Strengthening Four National Values through the Socialization of MPR-RI Pillars to the Jambi-Yogyakarta Student Family Organization (KPJ-Y) in the Special Region of Yogyakarta

Rizky Firnanda¹, M. Rizki Alfareza² Gusti Mubarak³

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

²Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Indonesia

³Institut Teknologi Yogyakarta, Yogyakarta, Indonesia

Abstract

This study aims to examine efforts to strengthen national values through the socialization of the Four Pillars of the MPR-RI to members of the Jambi-Yogyakarta Student Family Organization (KPJ-Y) in the Special Region of Yogyakarta. The Four Pillars referred to include Pancasila as the state ideology, the 1945 Constitution as the constitution, the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) as the form of the state, and Bhinneka Tunggal Ika as the motto of unity. The research method used is descriptive qualitative with a field study approach, involving interviews, observations, and documentation of the socialization activities. The results indicate that the socialization of the Four Pillars of the MPR-RI is able to enhance KPJ-Y members' understanding of national values, strengthen national identity, and foster critical and participatory attitudes in the life of the nation and the state. This study emphasizes the importance of the role of youth organizations as agents for disseminating national values in the modern era.

Keywords: National Values; Four Pillars; KPJ-Yogyakarta

Empat Penguatan Nilai Kebangsaan melalui Sosialisasi Pilar MPR-RI kepada Organisasi Keluarga Pelajar Jambi - Yogyakarta (KPJ - Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya penguatan nilai kebangsaan melalui sosialisasi Empat Pilar MPR-RI kepada anggota Organisasi Keluarga Pelajar Jambi-Yogyakarta (KPJ-Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Empat Pilar yang dimaksud meliputi Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap kegiatan sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi Empat Pilar MPR-RI mampu meningkatkan pemahaman anggota KPJ-Y mengenai nilai-nilai kebangsaan, memperkuat identitas nasional, serta menumbuhkan sikap kritis dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penelitian ini menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan sebagai agen penyebar nilai-nilai kebangsaan di era modern.

Kata kunci: Nilai Kebangsaan, Empat Pilar, KPJ-Yogyakarta

Submitted: February 2, 2026

Accepted: February 5, 2026

Published: March 4, 2026

PENDAHULUAN

Penguatan nilai kebangsaan merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara Indonesia. Sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, keberagaman budaya, agama, dan suku menjadi salah satu kekayaan sekaligus tantangan dalam membangun rasa persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Nilai-nilai kebangsaan tidak hanya perlu dipahami, tetapi juga harus diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, khususnya oleh generasi muda sebagai penerus bangsa. (Sukmaningrum, P. S., Hasib, F. F., Rani, L. N., & Rusmita, S. A., 2021). Generasi muda memiliki peran strategis dalam

Contact: Rizky Firnanda | firnandarizky88@gmail.com

This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CCBY-SA 4.0) License (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

memastikan bahwa ideologi, nilai-nilai Pancasila, dan prinsip-prinsip negara tetap hidup dan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh lembaga negara maupun organisasi masyarakat untuk menanamkan pemahaman yang kuat mengenai dasar-dasar berbangsa dan bernegara kepada generasi muda, salah satunya melalui sosialisasi Empat Pilar MPR-RI. Empat Pilar MPR-RI, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan persatuan, merupakan pedoman fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sosialisasi terhadap empat pilar ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan upaya strategis untuk membentuk karakter kebangsaan yang kokoh dan membangun kesadaran kolektif akan tanggung jawab sebagai warga negara. Melalui sosialisasi, masyarakat terutama generasi muda dapat memahami pentingnya nilai-nilai tersebut, menyadari hak dan kewajibannya, serta mampu mengimplementasikan prinsip-prinsip kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, organisasi kemahasiswaan dan kepelajarannya memiliki peran vital karena mereka menjadi wadah yang memfasilitasi interaksi, diskusi, dan pertukaran ide yang konstruktif bagi anggotanya.

Salah satu organisasi yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter kebangsaan generasi muda adalah Keluarga Pelajar Jambi di Yogyakarta (KPJ-Y). Organisasi ini merupakan wadah bagi pelajar dan mahasiswa asal Jambi yang menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan, KPJ-Y tidak hanya berfungsi sebagai sarana menjalin persaudaraan dan solidaritas antaranggota, tetapi juga sebagai media untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Kegiatan-kegiatan yang menyentuh aspek pendidikan, sosial, budaya, dan kepemudaan menjadi sarana efektif dalam memperkuat identitas kebangsaan sekaligus memupuk rasa tanggung jawab sosial. (Solé, J., 2008). Dalam konteks sosialisasi Empat Pilar MPR-RI, KPJ-Y memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan yang dapat menyalurkan pemahaman tersebut kepada anggota dan masyarakat luas. Pentingnya sosialisasi empat pilar ini semakin diperkuat melalui interaksi langsung dengan narasumber yang memiliki pengalaman dan kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Dalam sesi diskusi yang diselenggarakan, hadir narasumber yang memiliki latar belakang politik dan pemerintahan yang luas, yaitu seorang tokoh yang pernah menjabat sebagai Wali Kota Jambi untuk dua periode berturut-turut, yakni periode 2013-2018 dan 2018-2023. Pengalaman beliau dalam memimpin sebuah kota besar memberikan perspektif praktis dan mendalam terkait implementasi nilai-nilai kebangsaan dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Narasumber tidak hanya menyampaikan teori atau konsep, tetapi juga berbagi pengalaman nyata dalam menghadapi tantangan kepemimpinan dan bagaimana nilai-nilai kebangsaan diterapkan dalam pengelolaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Perspektif praktis ini menjadi sangat berharga bagi anggota KPJ-Y yang sebagian besar masih berada dalam tahap pendidikan dan pengembangan diri, karena mereka dapat melihat contoh konkret bagaimana nilai-nilai Empat Pilar diterjemahkan dalam tindakan nyata. (Umar, Z., Adekoya, O. B., Oliyide, J. A., & Teplova, T., 2023).

Selain itu, kehadiran narasumber yang juga memiliki pengalaman panjang di bidang pemerintahan menghadirkan dimensi inspiratif yang kuat bagi para peserta. Diskusi yang interaktif memungkinkan anggota KPJ-Y untuk menggali lebih dalam mengenai hubungan antara kepemimpinan, pelayanan publik, dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. Melalui sesi tanya jawab, peserta dapat mengajukan pertanyaan mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga persatuan, bagaimana mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam pengambilan keputusan, serta pengalaman pribadi narasumber dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. Interaksi ini menjadi sarana pembelajaran yang lebih hidup dibanding sekadar membaca buku atau mengikuti pelajaran formal, karena peserta dapat mengaitkan teori dengan praktik nyata di lapangan. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar

MPR-RI kepada KPJ-Y ini juga mencerminkan upaya strategis dalam membangun sinergi antara generasi muda dan tokoh publik yang berpengalaman. Sinergi ini penting karena membentuk jaringan pembelajaran yang efektif antara pemuda sebagai agen perubahan dan tokoh masyarakat sebagai pembimbing atau role model. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa penguatan nilai kebangsaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau lembaga formal, tetapi juga melibatkan masyarakat sipil, organisasi kepelajarannya, serta para tokoh yang memiliki pengalaman dan integritas dalam mengelola kepentingan publik. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menekankan pemahaman normatif mengenai Empat Pilar, tetapi juga memberikan wawasan tentang implementasi nyata dalam kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan. (Smaoui, H., Mimouni, K., & Ben Salah, I., 2021).

Melalui penguatan nilai kebangsaan ini, diharapkan anggota KPJ-Y mampu membawa dampak positif tidak hanya bagi diri sendiri dan organisasi, tetapi juga bagi masyarakat luas. Mereka dapat menjadi teladan dalam menerapkan prinsip-prinsip kebangsaan di lingkungan akademik, sosial, dan komunitas tempat mereka berada. Pemahaman yang mendalam mengenai Empat Pilar MPR-RI diharapkan menjadi bekal dalam menghadapi berbagai tantangan global maupun nasional yang menuntut integritas, kesadaran berbangsa, dan kemampuan beradaptasi tanpa meninggalkan identitas sebagai warga negara Indonesia. Pendekatan yang melibatkan diskusi interaktif dengan tokoh berpengalaman, seperti mantan Wali Kota Jambi tersebut, memperkaya pengalaman belajar peserta, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menafsirkan dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan latar belakang tersebut, kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR-RI kepada organisasi KPJ-Y di Yogyakarta merupakan upaya yang strategis dan relevan untuk membangun kesadaran kebangsaan di kalangan generasi muda. Interaksi dengan narasumber yang memiliki pengalaman kepemimpinan konkret memperkaya pemahaman peserta, membekali mereka dengan wawasan praktis, dan menumbuhkan semangat kebangsaan yang kuat. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pendidikan, organisasi kepelajarannya, dan tokoh masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai dasar berbangsa dan bernegara, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi penerima pasif, tetapi juga pelaku aktif dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

LITERATURE REVIEW

Penguatan nilai kebangsaan merupakan aspek penting dalam membentuk identitas dan kesadaran bernegara bagi setiap warga negara Indonesia. Nilai-nilai kebangsaan, yang tercermin dalam Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman. Sosialisasi Empat Pilar MPR-RI telah diidentifikasi sebagai salah satu strategi efektif dalam menanamkan nilai-nilai tersebut, terutama kepada generasi muda yang merupakan calon pemimpin masa depan. Beberapa penelitian sebelumnya menekankan pentingnya peran organisasi kepemudaan dan pelajar dalam menyebarluaskan pemahaman kebangsaan, karena mereka memiliki jejaring luas dan kapasitas untuk mempengaruhi lingkungan sosial mereka. Dalam konteks organisasi keluarga pelajar, kegiatan sosialisasi yang terstruktur dapat membantu menanamkan pemahaman tentang peran serta tanggung jawab warga negara dalam menjaga integritas bangsa. Studi-studi terdahulu menunjukkan bahwa partisipasi aktif dalam organisasi berbasis pelajar tidak hanya meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai kebangsaan, tetapi juga memperkuat keterampilan sosial, kepemimpinan, dan toleransi antaranggota yang berasal dari latar belakang berbeda. Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, yang memiliki karakter budaya dan pendidikan yang kuat, pendekatan melalui sosialisasi Empat Pilar MPR-RI memiliki potensi signifikan untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (Sherif, M., & Erkol, C. T., 2017).

Penelitian tentang sosialisasi ini menekankan bahwa penguatan nilai kebangsaan bukan hanya sekadar penyampaian informasi, melainkan proses interaktif yang melibatkan diskusi, kegiatan kreatif,

dan refleksi bersama agar nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasi secara nyata oleh generasi muda. Dengan demikian, penguatan nilai kebangsaan melalui sosialisasi Empat Pilar MPR-RI kepada anggota Organisasi Keluarga Pelajar Jambi di Yogyakarta menjadi relevan, karena selain menumbuhkan identitas kebangsaan yang kuat, kegiatan ini juga dapat memperkuat jaringan sosial dan kepedulian terhadap pembangunan bangsa di tingkat lokal maupun nasional. (Smaoui, H., & Khawaja, M., 2017).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pengabdian masyarakat (*community service*) dengan pendekatan sosialisasi dan edukasi. Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian bukan sekadar menghasilkan data atau analisis akademik, tetapi lebih menekankan pada pemberdayaan masyarakat, khususnya anggota Organisasi Keluarga Pelajar Jambi – Yogyakarta (KPJ – Y) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan melalui kegiatan penyuluhan dan sosialisasi nilai-nilai kebangsaan yang tertuang dalam Empat Pilar MPR-RI, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. (Sherif, M., & Erkol, C. T., 2017). Pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan. Pertama, dilakukan persiapan materi sosialisasi, meliputi penyusunan modul, media penyampaian, dan strategi komunikasi yang sesuai dengan karakter peserta KPJ – Y. Materi disesuaikan agar dapat diterima dengan mudah, interaktif, dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, tahap implementasi kegiatan di lapangan dilakukan melalui pertemuan tatap muka, diskusi kelompok, dan tanya jawab untuk mendorong partisipasi aktif peserta. Dalam proses ini, penekanan diberikan pada pemahaman nilai-nilai kebangsaan serta cara penerapannya di lingkungan organisasi dan kehidupan sehari-hari.

Selain itu, pendekatan partisipatif digunakan untuk mendorong anggota KPJ – Y menjadi subjek yang aktif dalam kegiatan, bukan hanya sebagai penerima informasi. Aktivitas seperti simulasi, studi kasus, dan refleksi pengalaman pribadi membantu peserta memahami relevansi Empat Pilar MPR-RI dalam konteks identitas kebangsaan dan solidaritas sosial. Tahap berikutnya adalah monitoring dan evaluasi, yang dilakukan untuk menilai efektivitas kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui observasi partisipasi peserta, wawancara singkat, dan kuisioner sederhana untuk mengetahui pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan masukan untuk pengembangan kegiatan sosialisasi di masa mendatang, sehingga program dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak yang lebih nyata bagi penguatan nilai kebangsaan di kalangan anggota KPJ – Y. (Salhani, A., & Mouselli, S., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosialisasi Empat Pilar ini menjawab akan keresahan karena pemimpin terkesan "tidak peduli" dengan pancasila, banyak pembelajaran yang dulu fokus ke Pancasila sekarang terkikis, seperti PMP, P4 dll. Dalam kehidupan pemimpin itu pelengkap, yang ada untuk memberikan arahan untuk kebaikan. 4 pilar kebangsaan adalah tatanan tertinggi di Negara ini, namun bukan berarti tidak ada diatas nya, jika di runut alquran-Hadis lah sumber kedudukan tertinggi dalam kehidupan. Sebelum Dr Fasha, jadi DPR Setidaknya UUD 45, sudah 4x amandemen, dan saya bertanya kenapa di amendemen ternyata banyak manfaat nya, contoh KUHP dibuat oleh Belanda, tapi di sana tidak menerapkan itu, namun kita dijadikan kelinci percobaan. NKRI disebut kesatuan karena kita terdiri dari banyak pulau dan wilayah yang menyatu menjadi satu. Jika di AS berbentuk United persatuan - federasi, karena mereka terbagi menjadi negara bagian Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua.



Gambar 1. Penyampaian materi dalam diskusi



Gambar 2. Penyampaian materi dalam forum diskusi



Gambar 3. Menyimak Penyampaian materi dalam forum diskusi

Kegiatan ini dilakukan Oleh Organisasi Keluarga Pelajar Jambi - Yogyakarta (KPJ - Y) organisasi mahasiswa/pelajar provinsi Jambi di DIY . Sosialisasi 4 pilar Kebangsaan MPR RI dilakukan Oleh Dr.H.Syarif Fasha, ME (DPR-RI/MPR-RI Dapil Jambi) selaku narasumber, dan Rizky Firnanda.S.Pd (Plt Ketua Umum Keluarga Pelajar Jambi - Yogyakarta) selaku moderator . Dihadiri Oleh 87 Mahasiswa Lintas Kabupaten/Kota Provinsi Jambi yang ada di Yogyakarta, Pada 27 Februari 2025 di Hotel Tembok Batu Residence Yogyakarta (Jl. Sendowo E No.106, Sendowo, Sinduadi, Kec. Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284)



Gambar 4. Penyampaian materi mengenai 4 pilar



Gambar 5. Penjelasan materi



Gambar 6. Pemaparan materi.



Gambar 7. Pemberian penghargaan

1. Pancasila

Pancasila adalah dasar negara dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Sebagai salah satu dari empat pilar kebangsaan yang dijunjung oleh MPR RI, Pancasila menempati posisi sentral karena menjadi pedoman dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat pilar kebangsaan itu terdiri dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, namun Pancasila memegang peranan paling mendasar karena berisi nilai-nilai fundamental yang membentuk identitas bangsa. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman formal dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan, tetapi juga menjiwai kehidupan sosial, budaya, dan politik masyarakat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan cita-cita luhur bangsa, seperti keadilan sosial, persatuan, dan kemanusiaan. Dalam kehidupan bernegara, Pancasila menjadi dasar pengambilan keputusan, menuntun pemerintah dalam menyusun kebijakan, serta memberi arah bagi setiap warga negara untuk bersikap dan bertindak. Dengan Pancasila sebagai panduan, perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dapat dikelola secara harmonis sehingga tercipta kesatuan dan persatuan bangsa. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari berarti menjunjung tinggi toleransi, menghormati hak orang lain, dan memprioritaskan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok. (Salhani, A., & Mouselli, S., 2022).

Sebagai bagian dari empat pilar kebangsaan, Pancasila memiliki hubungan erat dengan tiga pilar lainnya. UUD 1945 menjadi bentuk konkret dari Pancasila, menjabarkan nilai-nilai Pancasila ke dalam sistem hukum dan penyelenggaraan negara. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi wujud nyata persatuan bangsa yang dipersatukan oleh Pancasila. Sedangkan Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya keragaman dan toleransi, yang sejalan dengan sila-sila Pancasila yang menegaskan kemanusiaan dan persatuan. Dengan demikian, Pancasila bukan sekadar simbol atau slogan, tetapi pedoman yang mengikat seluruh aspek kehidupan berbangsa, memastikan stabilitas politik, keharmonisan sosial, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seiring perkembangan zaman, tantangan baru muncul yang dapat menguji penerapan Pancasila, seperti globalisasi, pergeseran nilai moral, dan meningkatnya intoleransi. Oleh karena itu, pemahaman Pancasila harus diinternalisasi secara mendalam, terutama melalui pendidikan dan kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan hanya menjadi materi formal di sekolah atau kampus, tetapi harus menjadi sikap dan tindakan nyata yang menuntun masyarakat dalam bersikap adil, menghormati

perbedaan, dan bekerja untuk kepentingan bangsa. Dengan demikian, Pancasila tetap relevan dan mampu mempersatukan bangsa dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. Dengan demikian, posisi Pancasila dalam empat pilar kebangsaan MPR RI menegaskan bahwa Pancasila adalah fondasi moral dan ideologi bangsa. Tanpa pemahaman dan penerapan Pancasila, tiga pilar lainnya tidak dapat berfungsi secara optimal. Pancasila menanamkan rasa tanggung jawab, kepedulian, dan kecintaan terhadap tanah air sehingga setiap warga negara memiliki kesadaran untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal, sangat bergantung pada sejauh mana Pancasila menjadi pedoman hidup yang dipegang teguh oleh seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila sebagai panduan utama, empat pilar kebangsaan tidak hanya menjadi konsep formal, tetapi benar-benar menjadi fondasi yang menguatkan keutuhan, kedaulatan, dan keharmonisan bangsa.

2. UUD 1945

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan konstitusi negara Republik Indonesia yang menjadi landasan hukum tertinggi dan sumber dari seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD 1945 lahir sebagai hasil dari perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka dan sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara agar berjalan sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Sebagai dokumen fundamental, UUD 1945 bukan hanya sekadar teks hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai dasar bangsa, yang meliputi keadilan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan rakyat. Dalam perjalanan sejarahnya, UUD 1945 mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian, tetapi prinsip-prinsip dasar yang terkandung di dalamnya tetap menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara. Sejalan dengan pentingnya konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) memperkenalkan konsep 4 Pilar Kebangsaan yang terdiri atas Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar-pilar ini bukan sekadar simbol formal, tetapi merupakan landasan ideologis dan praktis bagi seluruh warga negara dan penyelenggara pemerintahan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Pilar pertama, Pancasila, menegaskan bahwa ideologi negara Indonesia adalah berdasarkan lima sila yang menjadi pedoman moral, politik, dan sosial. Pancasila mengatur perilaku warga negara dalam hubungan sosial dan politik, menuntun negara agar setiap kebijakan dan peraturan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan ketuhanan. Pancasila menjadi titik temu bagi seluruh warga negara, sehingga perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dapat bersatu dalam kerangka nasional yang harmonis.

Pilar kedua adalah UUD 1945 itu sendiri. UUD 1945 bukan hanya sebuah dokumen hukum, tetapi juga mencerminkan semangat perjuangan bangsa Indonesia untuk merdeka, adil, dan sejahtera. Melalui UUD 1945, negara menegaskan hak-hak dasar warga negara, membatasi kekuasaan pemerintah, dan menetapkan struktur penyelenggaraan negara, termasuk lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan adanya UUD 1945, negara memiliki pedoman yang jelas dalam membuat kebijakan, melindungi hak warga, dan memastikan prinsip demokrasi berjalan secara konsisten. UUD 1945 juga mengatur tentang kewajiban warga negara, sehingga setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga keutuhan dan kesejahteraan bangsa. Pilar ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menegaskan bentuk negara Indonesia sebagai negara yang bersatu. NKRI menuntut seluruh elemen bangsa untuk menempatkan persatuan di atas kepentingan kelompok atau daerah tertentu. Kesadaran akan NKRI mendorong pembangunan nasional yang merata, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Dengan menguatkan NKRI, Indonesia dapat tetap stabil dan

mampu menghadapi tantangan global maupun ancaman internal yang berpotensi memecah belah bangsa. Konsep NKRI juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari berbagai pulau, suku, budaya, dan bahasa, seluruh wilayah tetap berada dalam satu payung konstitusi yang sama, sehingga membentuk identitas nasional yang kokoh. (Rusgianto, S., & Ahmad, N., 2013).

Pilar keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu.” Semboyan ini menekankan pentingnya toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat. Bhinneka Tunggal Ika menuntun warga negara untuk melihat perbedaan sebagai kekayaan budaya, bukan sebagai sumber konflik. Kesadaran ini mendorong terciptanya masyarakat yang inklusif, harmonis, dan saling menghargai, sekaligus memperkuat rasa persatuan yang merupakan landasan bagi kelangsungan NKRI. Melalui pemahaman Bhinneka Tunggal Ika, setiap warga negara mampu bersikap adil dan menghormati hak orang lain, sehingga membangun masyarakat yang demokratis dan berbasis nilai kemanusiaan. Integrasi keempat pilar ini menjadi kunci dalam pembangunan nasional. Pancasila menjadi ideologi dan pedoman moral, UUD 1945 menjadi pedoman hukum, NKRI menjadi bentuk negara yang harus dijaga, dan Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip sosial yang menjaga persatuan. MPR RI menekankan bahwa penguatan 4 Pilar Kebangsaan sangat penting bagi generasi muda agar memiliki identitas nasional yang jelas, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mampu menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dengan memahami dan mengamalkan 4 Pilar Kebangsaan, setiap warga negara berkontribusi pada stabilitas politik, keadilan sosial, dan keharmonisan masyarakat, sekaligus menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan singkatan NKRI, merupakan salah satu pilar utama dari 4 Pilar Kebangsaan yang dicanangkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Pilar ini menegaskan bentuk negara Indonesia sebagai negara yang bersatu, tidak terpecah-pecah, dan memiliki satu kedaulatan yang diakui secara nasional maupun internasional. NKRI menjadi fondasi politik dan hukum yang memastikan seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, berada dalam satu kesatuan pemerintahan yang sama. Bentuk negara kesatuan ini lahir dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang menyadari bahwa persatuan merupakan kekuatan terbesar dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar negeri. Sejak Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa menekankan bahwa kesatuan wilayah dan pemerintahan adalah hal mutlak yang harus dijaga agar cita-cita kemerdekaan dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, NKRI memiliki fungsi strategis karena menjadi wadah bagi penerapan Pancasila sebagai ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai prinsip sosial yang menegaskan keberagaman. NKRI menuntut seluruh warga negara untuk memiliki rasa cinta tanah air, kesadaran akan pentingnya persatuan, dan tanggung jawab untuk menjaga keutuhan negara. Kesadaran akan NKRI bukan hanya bersifat simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti mematuhi hukum, menghormati perbedaan, berpartisipasi dalam pembangunan nasional, dan menolak segala bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara. NKRI juga menegaskan bahwa meskipun Indonesia terdiri atas beragam suku, budaya, agama, dan bahasa, seluruh perbedaan itu berada dalam satu kerangka hukum dan pemerintahan yang sama, sehingga menjadi sumber kekuatan dan identitas nasional.

Pilar NKRI memiliki relevansi yang sangat penting dalam konteks sejarah bangsa Indonesia. Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam persatuan,

mulai dari upaya separatisme, konflik antarwilayah, hingga pengaruh ideologi asing yang dapat memecah belah masyarakat. Pengalaman masa lalu ini mengajarkan bahwa tanpa kesadaran dan komitmen untuk mempertahankan NKRI, bangsa Indonesia akan sulit mencapai tujuan kemerdekaan, yaitu membangun masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, penguatan NKRI menjadi salah satu prioritas MPR RI dalam menjaga stabilitas politik, keamanan nasional, dan kesatuan sosial. Tanpa landasan ini, penerapan Pancasila, pelaksanaan UUD 1945, maupun prinsip Bhinneka Tunggal Ika akan kehilangan arah dan makna karena negara yang terpecah tidak mampu menegakkan hukum dan menciptakan kesejahteraan secara merata. Selain itu, NKRI juga memiliki implikasi penting terhadap tata pemerintahan dan pembangunan nasional. Sistem pemerintahan yang bersifat kesatuan memastikan adanya koordinasi yang efektif antara pusat dan daerah, meskipun dalam praktiknya diberikan otonomi daerah untuk mengatur urusan lokal. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya terpusat di ibu kota atau pulau tertentu, tetapi tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Konsep NKRI mengajarkan bahwa kemajuan satu daerah tidak boleh mengorbankan kepentingan daerah lain dan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama di bawah payung negara yang sama. NKRI juga menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan nasional, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga pertahanan dan keamanan, sehingga setiap langkah pemerintah memiliki arah yang jelas dan konsisten dengan kepentingan nasional.

Kesadaran dan pemahaman tentang NKRI juga berkaitan erat dengan upaya membangun karakter bangsa. NKRI mendorong warga negara untuk menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga tercipta rasa tanggung jawab sosial dan persatuan yang kuat. Dalam kehidupan sehari-hari, NKRI diwujudkan melalui sikap saling menghormati antarwarga negara, menghargai perbedaan budaya dan agama, serta menolak segala bentuk konflik atau diskriminasi yang dapat mengancam kesatuan. Kesadaran ini harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan dari pemerintah maupun tokoh masyarakat, sehingga generasi muda memahami arti penting persatuan dan mampu menjadi garda terdepan dalam mempertahankan keutuhan bangsa. NKRI juga menegaskan posisi Indonesia di kancah internasional. Sebagai negara yang bersatu, Indonesia memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam diplomasi global, menjaga kedaulatan wilayah, dan berpartisipasi dalam berbagai forum internasional. Kesatuan ini membuat Indonesia menjadi negara yang dihormati dan diperhitungkan oleh negara lain karena memiliki stabilitas politik, persatuan sosial, dan sistem pemerintahan yang kuat. NKRI bukan sekadar konsep formal, tetapi juga strategi praktis untuk memperkuat posisi Indonesia di dunia global, menjaga sumber daya alam dan manusia, serta memastikan setiap kebijakan luar negeri mendukung kepentingan nasional tanpa merugikan masyarakat.

4. Bhinneka Tunggal Ika

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara Indonesia yang secara harfiah berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu”. Ungkapan ini menjadi cerminan dari keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat, namun tetap bersatu sebagai satu bangsa. Semboyan ini berasal dari Kitab Sutasoma karangan Mpu Tantular pada abad ke-14, dan secara filosofis menjadi dasar untuk membangun persatuan dalam keragaman. (Rahman, A., Markom, R., & Halim, A. H. A., 2022). Makna Bhinneka Tunggal Ika menekankan pentingnya toleransi, saling menghargai perbedaan, serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam konteks 4 Pilar Kebangsaan MPR RI, Bhinneka Tunggal Ika menjadi prinsip yang melekat dan menjadi fondasi untuk memperkuat identitas nasional serta mengarahkan kehidupan berbangsa dan

bernegara. Pilar pertama, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, menekankan nilai-nilai moral, etika, dan ideologi yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa. Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan sila-sila Pancasila, khususnya sila kedua dan sila ketiga, yang mengajarkan kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Keberagaman yang ada di Indonesia tidak menjadi penghalang untuk membangun nilai moral yang sama, melainkan menjadi kekuatan dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Bhinneka Tunggal Ika mendorong setiap warga negara untuk menghormati perbedaan, sehingga penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menjadi nyata melalui sikap saling menghargai, toleran, dan menghormati hak-hak orang lain. Dengan demikian, semboyan ini berperan sebagai pengikat yang menegaskan bahwa keberagaman tidak boleh menjadi pemecah bangsa, melainkan harus menjadi fondasi persatuan dan kekuatan kolektif.

Pilar kedua, yaitu UUD 1945 sebagai konstitusi negara, memberikan kerangka hukum dan aturan yang mengatur kehidupan bernegara. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika menjadi pedoman dalam penerapan hukum yang adil dan merata bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun golongan. UUD 1945 menjamin hak-hak warga negara dan mendorong partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan bangsa. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan bahwa hukum harus diterapkan secara inklusif dan tidak diskriminatif, sehingga keadilan sosial dapat tercapai. Penerapan prinsip ini menumbuhkan rasa aman, nyaman, dan saling percaya antarwarga negara, serta memperkuat legitimasi hukum sebagai instrumen yang menjaga kesatuan bangsa di tengah keragaman. Pilar ketiga, yaitu NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) sebagai bentuk negara, menegaskan bahwa seluruh wilayah Indonesia adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Bhinneka Tunggal Ika memperkuat semangat ini dengan menekankan bahwa perbedaan budaya, bahasa, dan adat bukanlah penghalang bagi persatuan nasional. Justru, keberagaman tersebut menjadi identitas khas yang memperkaya jati diri bangsa Indonesia. Pilar ini mengingatkan bahwa meskipun terdapat berbagai perbedaan, seluruh elemen masyarakat harus memiliki kesadaran untuk menjaga keutuhan NKRI. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika menjadi panduan dalam menghadapi potensi konflik dan perbedaan kepentingan, karena dengan memahami dan menghormati keberagaman, persatuan tetap terjaga. Dengan demikian, NKRI tidak hanya menjadi konsep geografis, tetapi juga konsep sosial dan budaya yang hidup di hati setiap warga negara. Pilar keempat, yaitu Negara Indonesia yang demokratis berdasarkan musyawarah untuk mufakat, menekankan pentingnya partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan. Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan moral yang mendorong proses demokrasi yang inklusif, di mana setiap suara dan aspirasi masyarakat dihargai. Dalam kehidupan demokrasi, perbedaan pendapat dan kepentingan sering muncul, namun prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan untuk mencari titik temu melalui musyawarah, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan seluruh rakyat. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya berbasis mayoritas, tetapi juga menghormati hak minoritas, sehingga tercipta keadilan dan keseimbangan sosial. Prinsip ini memperkuat rasa kebersamaan dan persaudaraan antarwarga negara, sekaligus menjaga stabilitas politik dan sosial. Bhinneka Tunggal Ika menjadi benang merah yang menghubungkan keempat pilar kebangsaan MPR RI. Semboyan ini bukan sekadar simbol, melainkan pedoman hidup yang menuntun bangsa Indonesia untuk bersatu dalam keragaman. Tanpa adanya penghargaan terhadap perbedaan dan penerapan prinsip persatuan, penerapan keempat pilar kebangsaan akan mengalami kesulitan. Sebaliknya, dengan menanamkan nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan demokrasi yang berdasarkan musyawarah untuk mufakat dapat berjalan harmonis dan

efektif. Bhinneka Tunggal Ika menegaskan bahwa kekuatan Indonesia terletak pada kesanggupannya untuk mempersatukan perbedaan, sehingga bangsa ini tetap kokoh dan berkembang di tengah dinamika global. (Rahman, A., Ahmad, A. U. F., Bin-Nashwan, S. A., Muneza, A., Abdul Halim, A. H., & Markom, R., 2023).

Dengan demikian, Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya menjadi semboyan nasional, tetapi juga prinsip operasional dalam mengimplementasikan 4 Pilar Kebangsaan MPR RI. Nilai-nilai persatuan dalam keragaman, penghormatan terhadap hukum, kesadaran menjaga keutuhan NKRI, dan semangat demokrasi yang inklusif semuanya berpijak pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Penerapan prinsip ini menjamin bahwa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat, berdaulat, adil, dan makmur, serta mampu menghadapi tantangan masa depan tanpa kehilangan jati diri dan nilai-nilai luhur bangsa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari artikel ini menekankan pentingnya penguatan nilai kebangsaan di kalangan generasi muda, khususnya pelajar perantau dari Jambi yang tergabung dalam Organisasi Keluarga Pelajar Jambi – Yogyakarta (KPJ-Y). Sosialisasi empat pilar MPR-RI, yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, menjadi strategi yang efektif untuk menumbuhkan pemahaman, kecintaan, dan kesadaran akan identitas kebangsaan. Melalui kegiatan sosialisasi, anggota KPJ-Y tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis mengenai empat pilar tersebut, tetapi juga mengalami proses internalisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang pada akhirnya mempengaruhi sikap, perilaku, dan interaksi sosial mereka baik di lingkungan organisasi maupun masyarakat luas. Hasil dari sosialisasi menunjukkan bahwa keterlibatan aktif pelajar dalam kegiatan ini mampu menumbuhkan rasa tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Pelajar dapat melihat hubungan langsung antara nilai-nilai kebangsaan dan praktik kehidupan sehari-hari, termasuk dalam menjalin hubungan sosial antaranggota organisasi maupun dengan masyarakat lokal di Yogyakarta. Dengan demikian, program sosialisasi empat pilar tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan, tetapi juga sebagai media pembentukan karakter yang menekankan toleransi, penghargaan terhadap keragaman, dan loyalitas terhadap negara. Penekanan pada Bhinneka Tunggal Ika, misalnya, menumbuhkan kesadaran bahwa meskipun berasal dari latar belakang daerah dan budaya yang berbeda, setiap anggota memiliki kesamaan sebagai warga negara Indonesia yang harus saling menghargai.

Selain itu, sosialisasi ini juga memperkuat jaringan sosial dan solidaritas di antara anggota KPJ-Y, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi maupun masyarakat. Proses sosialisasi menekankan dialog, diskusi, dan refleksi bersama, sehingga nilai kebangsaan tidak hanya diterima secara pasif, tetapi juga dipahami secara kritis dan kontekstual. Aktivitas ini memungkinkan pelajar untuk mengaitkan pengalaman pribadi mereka dengan prinsip-prinsip negara, sehingga pemahaman terhadap empat pilar MPR-RI menjadi lebih hidup dan aplikatif. Secara tidak langsung, pengalaman ini membentuk karakter kepemimpinan, rasa tanggung jawab sosial, dan kemampuan beradaptasi di tengah perbedaan sosial dan budaya, yang merupakan bekal penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih jauh, artikel ini menegaskan bahwa penguatan nilai kebangsaan melalui sosialisasi empat pilar MPR-RI memiliki dampak jangka panjang terhadap pembentukan identitas nasional yang kokoh. Sosialisasi tidak hanya berhenti pada penyampaian materi, tetapi juga menyertakan metode-metode yang mendorong partisipasi aktif, pemecahan masalah bersama, dan refleksi kritis atas isu-isu kebangsaan yang relevan. Hal ini penting karena generasi muda sebagai bagian dari KPJ-Y memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan, membangun masyarakat yang harmonis, dan meneruskan nilai-nilai kebangsaan kepada generasi berikutnya. Dengan kata lain,

sosialisasi empat pilar berperan sebagai instrumen pendidikan karakter yang dapat mengarahkan pelajar untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Rahman, A., Ahmad, A. U. F., Bin-Nashwan, S. A., Muneeza, A., Abdul Halim, A. H., & Markom, R. (2023). Policy approach adopted for issuance of Green Sukuk: is priority given to priority needed areas? *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2022-0279>
- Rahman, A., Markom, R., & Halim, A. H. A. (2022). Economic Infrastructure Development in Bangladesh through Sukuk Financing. *Journal of System and Management Sciences*, 12(5), 463–486. <https://doi.org/10.33168/JSMS.2022.0527>
- Rusgianto, S., & Ahmad, N. (2013). Volatility behavior of Sukuk market: An empirical analysis of the Dow Jones CitiGroup Sukuk Index. *Middle East Journal of Scientific Research*, 13(SPLISSUE), 93–97. <https://doi.org/10.5829/idosi.mejsr.2013.13.1887>
- Salhani, A., & Mouselli, S. (2022). The impact of Tier 1 sukuk (Islamic bonds) on the profitability of UAE Islamic banks. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 22(4), 796–810. <https://doi.org/10.1108/JFRA-12-2021-0461>
- Santoso, I. R. (2020). Green sukuk and sustainable economic development goals: Mitigating climate change in Indonesia. *Global Journal Al-Thaqafah*, 10(1), 18–26. <https://doi.org/10.7187/GJAT072020-3>
- Sherif, M., & Erkol, C. T. (2017). Sukuk and conventional bonds: shareholder wealth perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 8(4), 347–374. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0105>
- Smaoui, H., & Khawaja, M. (2017). The determinants of Sukuk market development. *Emerging Markets Finance and Trade*, 53(7), 1501–1518. <https://doi.org/10.1080/1540496X.2016.1224175>
- Smaoui, H., Mimouni, K., & Ben Salah, I. (2021). Do Sukuk spur infrastructure development? *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 14(4), 655–670. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-06-2020-0301>
- Solé, J. (2008). Prospects and challenges for developing corporate sukuk and bond markets© International Monetary Fund.: Lessons from a Kuwait case study. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 1(1), 20–30. <https://doi.org/10.1108/17538390810864232>
- Sukmaningrum, P. S., Hasib, F. F., Rani, L. N., & Rusmita, S. A. (2021). Impact of macroeconomics on corporate Sukuk yield in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11(4), 418–429. <https://doi.org/10.33403/rigeo.800658>
- Sulistiani, D., & Tjahjadi, B. (2023). The right purpose on the right covenant: Does the loan purpose affect the debt covenant through the Şukūk rating? *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 15(1), 130–147. <https://doi.org/10.55188/ijif.v15i1.489>
- Trianto, B., & Masrizal. (2021). Sukuk and Islamic banking financing: Their impacts on the real sector. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 7(4), 671–686. <https://doi.org/10.21098/jimf.v7i4.1407>
- Uluyol, B. (2023). A comprehensive empirical and theoretical literature survey of Islamic bonds (sukuk). *Journal of Sustainable Finance and Investment*, 13(3), 1277–1299. <https://doi.org/10.1080/20430795.2021.1917224>

- Umar, Z., Adekoya, O. B., Oliyide, J. A., & Teplova, T. (2023). The spillover of media sentiment on the sukuk bonds during COVID-19 pandemic. *Applied Economics*, 56(3), 360-374. <https://doi.org/10.1080/00036846.2023.2167926>
- Yıldırım, S., Yıldırım, D. C., & Diboglu, P. (2020). Does Sukuk market development promote economic growth? *PSU Research Review*, 4(3), 209–218. <https://doi.org/10.1108/PRR-03-2020-0011>
- Zain, N. S., & Muhamad Sori, Z. (2020). An exploratory study on Musharakah SRI Sukuk for the development of Waqf properties/assets in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 12(3), 301–314. <https://doi.org/10.1108/QRFM-09-2018-0099>